

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANTUL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
ALAM**

Studi Kasus Bencana Banjir Dan Longsor Di Kecamatan Imogiri Kabupaten
Bantul Yogyakarta Tahun 2017

M. Nur Arifin

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (*emergency response*). Maka dari itu Pemerintah harus siap siaga untuk menghadapi ancaman bencana yang akan terjadi, kesiapsiagaan bencana menjadi sangat penting jika daerah tersebut telah dipetakan menjadi daerah rawan bencana.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran BPBD dalam penanggulangan banjir dan longsor di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dan longsor di Kecamatan Imogiri. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPBD dilihat dari tiga indikator antara lain. Koordinator, Fasilitator, Stimulator, Peran BPBD dalam penanggulangan bencana alam banjir dan longsor di Kecamatan Imogiri dalam Tahap pelaksanaan tanggap darurat telah berjalan sesuai dengan tugasnya, dilihat dari upaya yang dilakukan yaitu identifikasi daerah rawan bencana, pemetaan jalur evakuasi bencana, dan pendidikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Saat tanggap darurat atau saat terjadi bencana, upaya yang dilakukan pengerahan Tim Reaksi Cepat (TRC), penyelamatan dan evakuasi korban, perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pasca bencana, upaya yang dilakukan Rekonstruksi serta Rehabilitasi. Terdapat beberapa tindakan yang belum sepenuhnya terlaksana yaitu kurangnya koordinasi dan informasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat dalam segala tindakan atau kegiatan penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Bantul, Faktor yang mempengaruhi peran BPBD antara lain; Faktor pendukung meliputi: Komunikasi, Dukungan pemerintah. Faktor penghambat meliputi: sumber daya manusia, sarana prasarana, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap bencana banjir.

Kata kunci: Peran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, termasuk bencana alam. Bencana alam merupakan fenomena alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan kehancuran lingkungan yang pada akhirnya dapat menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan pembangunan yang telah dibangun selama ini. Bencana alam yang terjadi akibat eksploitasi sumberdaya alam tanah, hutan, dan air secara berlebihan serta akibat perubahan cuaca atau iklim global telah mengakibatkan bertambahnya lahan kritis, sehingga dapat mengakibatkan banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan serta meningkatnya laju erosi dan sedimentasi. Salah satu fenomena alam yang menimbulkan kerugian besar yang selalu mengancam beberapa wilayah di Indonesia adalah bencana banjir dan longsor. Banjir dan longsor merupakan suatu fenomena alam biasa, namun akan menjadi suatu yang sangat merugikan jika mengancam keberadaan hidup manusia.

Kabupaten Bantul adalah salah satu wilayah rawan terhadap ancaman bencana, bencana yang terbesar adalah bencana gempa bumi tahun 2006 berpusat di Kabupaten Bantul, dan semua Kecamatan dari total 17 Kecamatan merasakan guncangan bahkan terasa sampai di Provinsi Jawa Tengah, Jumlah korban keseluruhan dari Wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah mencapai 5.743 orang meninggal dan sejumlah 38.423 orang luka-luka

(data 12 Juni 2005, jam 18.00 WIB). Akibat dari adanya gempa tersebut sejumlah 126.932 keluarga kehilangan rumah tinggalnya, 183.399 keluarga rumahnya rusak berat, dan 259.816 keluarga rumahnya rusak ringan (data tanggal 12 Juni 2005, jam 18.00, Media Center). Berdasarkan dari jumlah data tersebut jumlah pengungsi di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah diperkirakan mencapai 330.331 keluarga.

Selain itu Kabupaten Bantul rawan terhadap bencana Banjir dan longsor, hal ini dikarena Wilayah Kabupaten Bantul membentuk sebuah cekungan atau basin air tanah regional yaitu Sistem Akuifer Merapi hingga Sistem Akuifer Kepesisiran. Sehingga Relief dari daerah ini relatif datar yang terbentuk oleh akibat adanya proses erosi di daerah hinterland dan sedimentasi di dataran aluvial kepesisiran (*coastal alluvial plain*). Berdasarkan karakteristik wilayah tersebut, maka potensi bencana yang mungkin terjadi adalah bencana banjir. Bencana banjir di Kabupaten Bantul pada umumnya terjadi di sungai-sungai besar, salah satunya Sungai Opak. Sungai ini mudah meluap karena tidak mampu menampung luapan debit air dari sungai Oyo, Daerah yang sering dibaniri yaitu diKecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.

Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kabupaten Bantul pada Selasa (28/11/2017), Bencana yang melanda wilayah Bantul disebabkan adanya badai Cempaka yang menghuyur

seluruh wilayah DIY. Kabupaten bantul selatan paling banyak terkena dampak bencana, total ada 132 titik kejadian bencana baik longsor, banjir, maupun pohon tumbang. Hingga Selasa malam warga, petugas dan relawan masih bersiaga mengantisipasi keadaan yang memburuk pasca hujan yang mengguyur hampir 24 jam tersebut.

Kecamatan Imogiri, terdapat beberapa kerusakan terparah di Dusun Ndogongan. Dusun ini terletak di sebelah barat di bantaran Sungai Oya yang berada di dekat Jembatan Siluk. Sumur kemasukan luapan air sungai hingga kotor dan tidak bisa dikonsumsi. Jalan raya Imogiri-Siluk-Panggung dan jalan dusun rusak. Aspal mengelupas dan timbunan lumpur memenuhi halaman rumah warga. Bencana tanah longsor terdapat di beberapa desa di Kecamatan Imogiri, beberapa di antaranya tanah longsor di Dusun Siluk I, Selopamiro Imogiri yang memutus akses jalan penghubung Dusun Siluk I dan Dusun Kajor. Terdapat beberapa rumah hancur karena di terjang longsor.

Data diatas menunjukkan masih Banyaknya korban jiwa maupun harta benda dalam peristiwa bencana yang selama ini terjadi di Kabupaten Bantul, dari total bencana selama tahun 2017, Kecamatan Imogiri mengalami jumlah kejadian angka tertinggi, hal ini lebih sering disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pemahaman pemerintah maupun masyarakat terhadap potensi kerentanan bencana serta upaya mitigasinya. Penanggulangan bencana masih sering dianggap sebagai bantuan dan

pertolongan saja yang belum dianggap sebagai program Penanggulangan atau mitigasi yang menyeluruh, dalam pelaksanaannya masih sering bersifat reaktif dan kurang konsepsional. Badan-badan atau instansi serta kekuatan yang mendukung memerlukan penggiatan setelah atau dekat sebelum bencana terjadi untuk dapat secara tepat dan cepat bertindak dalam mengatasi ancaman bencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pemerintah adalah yang paling bertanggung jawab untuk menangani bencana alam baik sebelum, ketika terjadi dan pasca terjadi bencana. Oleh karena itu pemerintah membentuk Badan yang bertanggung jawab untuk menangani permasalahan tersebut. Kabupaten Bantul adalah Kabupaten yang memiliki potensi bencana alam yang tinggi, oleh karena itu penulis ingin mengetahui: ***“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam Penanggulangan Bencana Alam”***

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka penulis ingin membatasi agar penelitian ini efisien dan sesuai permasalahan, dalam ranah pelaksanaannya, penulis hanya membahas pelaksanaan tanggap darurat untuk penanggulangan bencana alam bencana banjir dan longsor yang ada di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dalam menanggulangi

Tanggap Darurat bencana banjir dan Longsor diKecamatan Imogiri Kabupaten Bantul?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran BPBD dalam menanggulangi bencana alam banjir dan longsor di Kecamatan Imogiri?

Krangka dasar teori

1. Konsep Peran

Peran adalah perilaku individu yang diharapkan sesuai dengan posisi yang dimiliki. Peran yaitu suatu pola tingkah laku, kepercayaan, nilai, dan sikap yang diharapkan dapat menggambarkan perilaku yang seharusnya diperhatikan oleh individu pemegang peran tersebut dalam situasi yang umumnya terjadi.

Menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soerjono. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Pitana (2009), mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran sebagai:

1. **Koordinator.** Dalam penanggulangan bencana, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator diperlukan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara optimal. Pemerintah serta seluruh elemen masyarakat merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan sosialisasi agar terciptanya daerah tangguh bencana alam.
2. **Fasilitator.** sebagai fasilitator dalam Penanggulangan Bencana Alam, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung dalam penanggulangan bencana alam. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja

sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.

3. **Stimulator.** Peran Badan Penanggulangan Bencana Alam sebagai stimulator adalah Pemerintah dapat mencitakan strategi untuk mengurangi resiko dampak terjadinya bencana dan pelatihan penanggulangan dengan program pembangunan serta pelatihan sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari dampak bencana alam.

**a. Badan Penanguan
Bencana Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kordinasi Nasional Penanggulanagan Bencana. BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana. Menurut penulis pengertian BPBD adalah merupakan lembaga pemerintah yang

bergerak di bidang sosial yang mempunyai bagian-bagian struktur birokrasi dan memiliki sraf-staf ahli dalam bidang penyusunan penanganan bencana alam.

Dari sini dapat dilihat Peran Pemerintah dan Peran Daerah dalam penanggulangan bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 5 “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan bencana” pasal 6 menyatakan Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- 1) Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- 2) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- 3) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standart pelayanan minimum;
- 4) Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- 5) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang memadai;

- 6) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- 7) Pemeliharaan arsip/dokumen onteik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

2. Konsep Bencana Alam

Sedangkan definisi bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

3. Penanggulangan Bencana Alam

Dalam Peraturan Daerah No. 05 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan dalam merespon persoalan bencana di Indonesia, termasuk untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan program penanggulangan bencana.

Disetiap perundang-undangan adalah kebijaka, namun tidak setiap kebijakan diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan. Dengan ini pemerintah menetapkan kebijakan yang berupa undang-undang.

Terkait dengan penanggulangan bencana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 05 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan “penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitas”.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka peneliti ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu berusaha mengungkapkan suatu masalah yang terjadi kemudian menganalisis informasi data yang didapat. Data tersebut dapat berupa naskah wawancara, catatan dan dokumentasi dan lainnya. Sehingga penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari dan menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan penelitian ini

mengambil studi kasus di kecamatan Imogiri, kabupaten Bantul, dimana kecamatan Imogiri menjadi titik persoalan yang akan peneliti kaji dan pengumpulan data akan diperoleh dari Kantor Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta maupun dari masyarakat Imogiri khususnya warga yang terkena dampak bencana alam banjir dan longsor.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendapatkan informasi atau fakta-fakta dilapangan untuk mendukung suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan dua langkah sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam Observasi ini peneliti hanya sebagai pengamat yang melihat bagaimana dan apa yang terjadi dilapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi tempat penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada reponden guna mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian.

Seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln yang dikutip Moleong (2000) mengatakan bahwa pengamatan memungkinkan peneliti mencatat

peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.

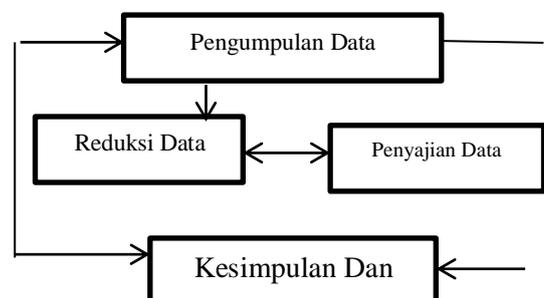
Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah tanya jawab dengan narasumber. Narasumber yaitu merupakan seseorang yang mengetahui informasi data yang akan kita cari, dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah Kepala BPBD Bantul serta anggota dan Masyarakat terkena banjir dan longsor.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk teknik pengumpulan data melalui dokumen dan peninggalan tertulis yang berkaitan erat dengan penelitian yang dikaji contoh foto-foto kawasan yang terena banjir maupun media masa atau koran.

4. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992), model analisis interaktif dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 3. Komponen analisis data: model interaktif
Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)

Hasil Pembahasan

1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dalam menanggulangi Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam menanggulangi bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Imogiri dapat dilihat pada indikator dalam pelaksanaannya yang akan dijelaskan dibawah sebagai berikut:

1. Koordinator

a. Koordinasi dengan masyarakat

Koordinasi BPBD kepada masyarakat ketika akan terjadinya bencana, BPBD memberikan arahan kepada masyarakat bagaimana tindakan yang harus dilakukan ketika suatu saat bencana datang secara tiba-tiba.

Pada saat bencana terjadi diperlukan banyak tindakan yang melibatkan banyak aktor bahkan organisasi dalam hal ini BPBD harus bekerjasama dan saling membutuhkan antar berbagai stakeholder lainnya. Sampai saat ini tidak ada dukungan informasi yang terpusat, akurat, akuntabel, cepat dan mudah diakses bagi para pengambil kebijakan penanggulangan bencana

terutama pemerintah. Data dan informasi yang ada masih kurang bisa diandalkan dan seringkali berasal dari sumber-sumber yang tak jelas sehingga keputusan dan langkah penanggulangan bencana yang diambil, baik pada tahap pra, saat dan paska bencana, kurang sesuai dengan tuntutan untuk cepat, tepat, prioritas, berdaya guna, transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan, non-diskriminatif, dan non-proletisi.

b. Koordinasi dengan instansi

BPBD Kabupaten Bantul melakukan koordinasi melibatkan beberapa instansi diantaranya TNI, POLRI BMKG serta pihak-pihak terkait. Dalam rapat koordinasi ini mengidentifikasi daerah yang terkena bencana sehingga dapat dilaksanakan penanganan yang tepat serta cepat.

Dalam meningkatkan kapasitas internal dan menjalin koordinasi yang intensif, BPBD Kabupaten Bantul menyelenggarakan pelatihan teknis dalam melakukan pengkajian data. Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagai ujung tombak BPBD Kabupaten Bantul dalam melakukan pengkajian data selalu dituntut untuk cepat dan tepat dalam mengidentifikasi cakupan lokasi, jumlah korban, kerusakan maupun kebutuhan dilokasi bencana. Dimana data awal tersebut akan dianalisa lebih dalam oleh Pusat

Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau (Pusdalops) dan dilaporkan kepada Pimpinan BPBD Kabupaten Bantul.

2. Fasilitator

- a. Fasilitator/fasilitasi dalam Penanggulangan Bencana Alam.

Dalam Penanggulangan Bencana Alam Fasilitator merupakan seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi.

BPBD Kabupaten Bantul memberikan fasilitasi pelatihan yang dilakukan oleh tim fasilitator untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya bencana. Serta, mengajarkan cara menghadapi bencana. Di antaranya, tim fasilitator bertugas mengajarkan masyarakat membentuk peta desa termasuk bentuk ancaman bencana. Lalu, penanganan sebelum dan saat bencana terjadi. Seperti menyiapkan jalur evakuasi serta peringatan dini sebelum bencana. Sehingga mindset masyarakat bukan lagi tindakan penanganan, tapi lebih ke arah pencegahan. Bagaimana harus bertindak sebelum bencana terjadi.

- b. Sarana Dan Prasarana Pendukung Penanggulangan Bencana

Dalam upaya penanggulanga bencana , BPBD memiliki program kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam Penanganan Bencana yang bertujuan untuk menunjang sarana dan prasarana pendukung Penanggulangan Bencana alam secara tepat dan cepat.

Sarana prasarana	Jumlah
Pick up	2
Rangger	2
Perahu karet	2
Perahu orange	2
Mobil damkar	5
Mobil tangki	2
Peralatan lainnya	

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Bantul terbilang masih baik, karena kendaraan operasional di produksi tahun muda. Namun dengan jumlah yang dimiliki saat ini masih terbilang kurang, mengenai masalah banjir BPBD hanya memiliki 2 unit perahu orange kemudian perahu karet memiliki 2 unit,

hal ini jika terdapat bencana yang cukup besar peralatan ini belum memadai dalam penyelamatan evakuasi.

3. Stimulator

a. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Dalam penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya BPBD perlu melakukan kegiatan Sosialisasi kepada Masyarakat. Hal ini ditujukan guna menciptakan masyarakat tangguh Bencana. Dengan adanya sosialisasi ini, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan ini diharapkan mampu mengurangi resiko bencana dan siap apabila suatu saat terjadi bencana secara tiba-tiba.

Latihan kesiapsiagaan warga sebelum dikukuhkan jadi destana ini sebagai bagian dari kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana yang sewaktu-waktu terjadi, sehingga diharapkan mampu meminimalisir korban, dalam kegiatan simulasi bencana itu dimulai dari skenario yang terdiri dari beberapa fase, yaitu fase pertama adalah fase aman, yang kemudian dilanjutkan dengan terjadinya hujan lebat yang menyebabkan volume air sungai Celeng meningkat.

Fase kedua yakni fase waspada banjir, yang mana masyarakat diberi gambaran

tanda-tanda akan terjadinya banjir kemudian terjadinya bencana banjir sampai dengan proses evakuasi dan penanganan korban. Bapak Suharno, Ssi menamahkan pernyataan sebagai berikut:

"Setelah simulasi dengan skenario dua fase itu kegiatan diakhiri evaluasi kegiatan simulasi bencana banjir dan Longsor. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari berbagai unsur terkait," katanya.

Dari penjelasan diatas beliau menegaskan bahwa BPBD juga meminta masyarakat waspada potensi tanah longsor, karena setidaknya BPBD memetakan tiga titik rawan longsor di kawasan yang berdekatan dengan talud Sungai Winongo Desa Donotirto Kretek.

b. Gladi/simulasi penanganan darurat BPBD Bantul

Pelatihan atau gladi/simulasi dimaksud untuk menguji tingkat kesiapsiagaan yang perlu dilakukan uji lapangan berupa pelatihan simulasi. Hal ini harus dilakukan secara berkala. Agar terciptanya kualitas anggota.

BPBD Kabupaten Bantul selalu melatih anggotanya agar nantinya dapat terciptanya

tim yang handal dan berkualitas. Pelatihan yang diberikan kepada anggota tim BPBD ini sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Perkembangan kondisi bencana yang terjadi melalui sistem penanganan darurat bencana dan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan yang ada, meningkatkan koordinasi, komunikasi, mobilisasi dalam penanganan darurat bencana, serta meningkatkan kemampuan pemahaman sistem komando penanganan darurat bencana. "Dengan adanya pelatihan ini diharapkan agar ke depannya anggota TRC dapat lebih mengenal dasar-dasar penyelamatannya dan anggota TRC nantinya tahu apa yang harus dilakukan jika melakukan penanganan dan pendataan korban bencana di lapangan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran dalam menanggulangi bencana alam banjir dan longsor di Kecamatan Imogiri.

1. Faktor pendukung

a. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bantul dalam upaya kesiapsiagaan Tanggap Darurat bencana cukup efektif dan berhasil, hal ini dapat dilihat dari informasi

yang akurat dan valid. Dari beberapa hasil penelitian dan wawancara oleh Kepala bidang Kedaruratan dan Logistik dan beberapa anggota lainnya ternyata Komunikasi menjadi salah satu faktor pendukung BPBD Kabupaten Bantul dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelamatan korban bencana.

b. Dukungan Pemerintah Daerah

BPBD sangat terdukung sekali dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana pemerintah daerah bisa merealisasikan anggaran yang dibutuhkan BPBD untuk mendukung penanggulangan bencana agar penanggulangan bencana bisa berjalan dengan baik

2. Faktor penghambat

a. Sumber Daya Manusia

BPBD memang mempunyai pesonil dengan sumber daya manusia yang kompeten namun BBD dalam peranya menaggulangi bencana tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya sumber daya manusia berasal dari instansi/organisasi, para relawan serta masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian Sumber daya manusia di BPBD Kabupaten Bantul masih

minim jika mendapati bencana skala besar. Sehingga BPBD masih mengharapkan bantuan dari para relawan serta masyarakat dan instansi lainya ikut serta dalam melaksanakan penanggulangan bencana khususnya Tahap Tangap Darurat.

b. Sarana dan prasarana

Sarana prasarana yang dimiliki BPBD Bantul belum terbilang lengkap, dapat dilihat pada tabel diatas, sarana operasional dalam penanggulangan bencana banjir dan longsor belum sepenuhnya memadai, jika terjadi bencana banjir dengan skala besar sarana prasana yang ada di BPBD hanya terdapat 2 unit prahu karet dan 2 unit prahu orange sehingga belum dapat memadai dalam penanggulanganya, BPBD masih sering meminjam sarana prasarana dari Pemrov, Satpol PP dan Dinas PU

c. Rendahnya Tingkat Kepedulian masyarakat terhadap Bencana

Masih rendahnya tingkat kepeuliah masyarakat terhadap ancaman bencana hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan bencana alam, dapat dilihat masih adanya masyarakat yang

membangun rumah di tepi bantaran sungai dan masih banyat terdapat masyarakat yang bercocok tanam di daerah rawan longsor, dalam hal ini BPBD selalu menghimbau masyarakat agar tidak beraktifitas atau menetap tinggal di daerah yang sudah ditetapkan titik sering terjadinya banjir dan longsor.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang diperoleh dari data-data atau sumber terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditemukan beberapa kesimpulan dan jawaban dari pokok permasalahan terkait penelitian yang dikaji.

1. *Kordinator*, Peran kordinasi BPBD dalam penanggulangan bencana alam banjir dan longsor di Kecamatan Imogiri dalam Tahap pelaksanaan tanggap darurat belum berjalan dengan efektif dan cepat, dilihat dari upaya yang dilakukan BPBD dalam proses Tanggap Darurat berkoordinasi dengan masyarakat hanya pada tokoh tertentu saja sehingga warga sekitar tidak mengetahui proses koordinasi yang dilakukan oleh BPDB Bantul untuk menginformasikan akan terjadinya banjir, sebaliknya warga setempat hanya memahami bahwa apabila terjadi tanda-tanda

adanya banjir harus melapor ke pihak terkait dan sebaliknya bukan pihak BPDB Bantul yang melakukan koordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi antara BPDB Bantul dengan warga setempat.

2. *Fasilitator*, BPBD Bantul dalam upaya Penanggulangan Bencana sudah ditunjang dengan peralatan dan perlengkapan dengan teknologi yang moderen, Peralatan yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Bantul dalam rangka Tanggap Darurat Bencana tergolong beberapa kelompok barang dan perlengkapan yang pertama peralatan operasional kerja dengan sistem komputer kemudian pendeteksi bencana alam, namun disini yang menjadi kendala adalah fungsi dari peralatan tersebut belum dimaksimalkan sehingga belum mendukung kegiatan-kegiatan BPBD baik pada masa pra bencana saat bencana maupun pasca bencana.

3. *Stimulator*, BPBD melakukan simulasi penanganan bencana banjir dan longsor pada warga Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, tujuan utama diadakan simulasi ini agar meningkatkan kualitas tim TRC dalam menangani bencana dilapangan, serta menciptakan kesiapsiagaan

masyarakat dan memberikan pelatihan secara langsung tentang prosedur evakuasi dan transportasi serta manajemen pendirian posko, tujuan dari diberikan sosialisasi simulasi bencana untuk membentuk warga yang siap siaga apabila suatu saat terjadi bencana secara tiba-tiba..

Namun disamping itu terdapat pula faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Tanggap Darurat meliputi:

- a. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tanggap darurat.
 1. Faktor pendukung
 - Komunikasi dengan baik kepada masyarakat sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan valid
 - Dukungan Pemerintah dapat merealisasikan anggaran yang dibutuhkan BPBD untuk mendukung terciptanya penanggulangan bencana alam dengan baik
 2. Faktor penghambat.
 - Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPBD masih minim jika terdapat bencana dengan skala besar.
 - Sarana Prasarana BPBD masih belum memadai.
 - Rendahnya tingkat Kepedulian masyarakat terhadap bencana

Daftar Pustaka

- Edi Suharto, 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung, Alfabeta:)
- Huberman, M & Miles, B.M. 1992. Analisis data kuantitatif. Jakarta: universitas indonesia (UIPress)
- Kaufman & Rasyid. 2011. *Tugas dan Fungsi Pemerintah*, (online),
- Lexy J. Moeloeng, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya),
- Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana. Bandung*. ALFABETA.
- Pitana I Gde. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Rijanta, dkk. 2014. *Modal Sosial dalam Manajemen Bencana*. UGM.
- Soerjono Soekanto. 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru : Rajawali Pers. Jakarta.
- Saebani, 2008. *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia.
- Solichin Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2012. *Psikologi Remaja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Siswanto Lindung, *Sistem Informasi Manajemen Komando Tanggap Darurat Bencana Letusan Gunung Merapi*, Universitas Gadjah
- Mariana Rina, *Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2013*. Fakultas Ilmu sosial dan politik . Universitas Riau. 2015
- Ramadhan Ilham dan matondang Armansyah, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam*. Fisip. Universitas Medan Area. 2016
- Febrin renny, *Peran Pemerintah Kabupaten Karo Dalam Penanggulangan Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Sumatera Utara Tahun 2013 – 2015*. Fakultas Ilmu sosial dan politik. Universitas Riau. 2016
- Awalia Vidia Reski dan Nuraen Andi, *Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara*. Fisip. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2015
- Nurbaity Iin, *Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanggulangan Banjir Rob Di Desa Alahair*

Jurnal :

Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2011-2015.
Fisip.Universitas Riau.
2018

Nasyiruddin dan Yusuf Badjido
Muhammad Yusuf
Badjido, *Strategi
Pemerintah Daerah
Dalam Penanggulangan
Bencana Banjir Di
Kabupaten
Bantaeng.* Universitas
Muhammadiyah Makassar.
2015

Sadat Anwar, *Efektivitas Kinerja
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Dalam
Pengurangan Resiko
Bencana Di Kota Baubau.*
Fisip. Universitas
Muhammadiyah Buton.
2016

Fauzi Lukman, *Peran Tentara
Nasional Indonesia Dalam
Penanggulangan Bencana
Di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta,*
Fakultas Ilmu sosial dan
politik. Universitas
Jenderal Achmad Yani.
2014

Hazam Soni, Santoso Edi,
Widayanti Wiwik, *Analisis
Kebijakan Pemerintah
Dan Partisipasi
Masyarakat Dalam Upaya
Penanggulangan Rob
(Studi Kasus Kota Tegal).*
Fakultas Ilmu sosial dan
politik. Universitas
Diponegoro. 2009

Handayani Riny. *Analisis
partisipasi masyarakat
dan peran pemerintah
daerah dalam pelaksanaan
manajemen bencana di*

*kabupaten serang provinsi
banten.* Fisip Universitas
Sultan Agung Tirtayasa
(2011)

Peraturan Perundang- undangan :

Departemen Komunikasi dan
Informatika RI. 2007.
Jakarta *Penanggulangan
Bencana Alam dalam
Perspektif Agama di
Indonesia .* Departemen
Komunikasi dan
Informatika RI.

Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul No 01 Tahun 2013
*Tentang Kesiapsiagaan
Dan Peringatan Didni
Dalam Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana*
Pasal 4

Peraturan presiden no 08 tahun
2008, *tentang badan
nasional penanggulangan
bencana,* pasal 1 ayat 1

*Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana.*
Jakarta : Kementerian
Hukum dan Hak Asasi
Manusia

*Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan
Bencana.* Jakarta :
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia

*Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang
Penanggulangan Bencana.*
Jakarta : Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia

Internet :

Pristiyanto, D. (2012). Diakses pada tanggal 24 April 2018, dari <http://psb.ipb.ac.id/index.php/news/185-sistem-komando>
<https://news.detik.com/jawaten-gah/3749965/sejumlah-jembatan-jebol-dihantam-banjir-di-bantul>. Diakses jum'at 05 januari 2018. Pukul 10:30 wib

Di akses dari, <http://imogiri-bantul.desa.id/index.php/>

first/artikel/8. pada tanggal, 1 Januari 2018 pukul 12.30 wib.

Di akses dari, <http://kec-imogiri.bantulkab.go.id/hal/profil>. pada tanggal, 1 Januari 2018 pukul 12.24 wib

<https://vienastra.wordpress.com/2011/03/31/bencana-dan-karakteristik-wilayah-yogyakarta/>

(<http://2frameit.blogspot.com/2011/11/tugasdanfungsipe-merintah.html>. diakses 28 November 2017. Pukul 22:33 wib.